

Kebebasan Akademik: Melanjutkan Gagasan Psikologi Perguruan Tinggi

Juneman Abraham

1. Pendahuluan: Psikologi Perguruan Tinggi Berkelas Dunia

Pada 2009, Prof. Dr. Ali Nina Liche Seniati, Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia, menawarkan gagasannya mengenai Psikologi Perguruan Tinggi (*Psychology of Higher Education*). Dalam risalahnya sepanjang 33 halaman, Seniati (2009) menyampaikan bahwa dalam rangka menjadi Universitas Berkelas Dunia (*World Class University*), terdapat sejumlah dimensi psikologis yang perlu diintervensi, baik pada tingkat individu maupun organisasional. Psikologi Kognitif hendaknya mampu mengubah persepsi dosen yang selama ini bias/menyimpang tentang riset (bahwa riset itu “barang sulit”, dan sebagainya). Psikologi Belajar, khususnya Pengkondisian Operan, hendaknya membuat perguruan tinggi menerapkan sistem imbalan dan hukuman yang tepat terkait dengan perilaku riset dan publikasi dosen. Psikologi Komitmen Organisasional hendaknya digunakan untuk menguatkan identitas, keterikatan emosional, persepsi keuntungan, dan loyalitas dosen sebagai sumber daya manusia dari perguruan tinggi.

Psikologi Kepemimpinan hendaknya menyadarkan kita bahwa karakteristik kepemimpinan global, seperti adil, inspiratif, berintegritas, visioner, egaliter, solutif, ilmiah dalam pengambilan keputusan, peka terhadap kesejarahan dan keragaman dalam organisasi, serta mampu mengembangkan secara berkelanjutan tingkat kepuasan dosen yang kontributif terhadap perguruan tinggi adalah ciri-ciri yang mutlak dipersyaratkan guna menuju Universitas Berkelas Dunia. Psikologi Humanistik seyogianya mampu mengawal pengembangan potensi dosen dengan dukungan struktural dari perguruan tinggi. Psikologi Kepribadian hendaknya menginspirasi bahwa sifat kebaikan hati, keterbukaan hati dan telinga, serta kesungguhan dan ketekunan perlu menjadi kriteria dasar seleksi dosen untuk menghasilkan dosen yang berjiwa peneliti yang tinggi. Teknik Pusat Penaksiran (*Assessment Centre*) hendaknya dikembangkan untuk seleksi dosen baru yang memiliki kompatibilitas dengan semangat Universitas Berkelas Dunia.

Tanpa bermaksud melakukan simplifikasi, penulis (Abraham, 2017) pernah menyatakan bahwa di samping kriteria objektif, yang dapat dilihat pada situs web pemeringkat Universitas Berkelas Dunia seperti *Times Higher Education* (THE) dan *Quacquarelli*

Symonds (QS), terdapat kriteria subjektif sebuah universitas berkelas dunia. Penulis menyatakan bahwa: “Ada sebuah pertanyaan menggelitik, 'Suasana seperti apa yang perlu untuk mencapai *World Class*, ketujuh kriteria tersebut?' Tidak cukup dengan kapital/modal ataupun infrastruktur, namun perlu suasana yang akan me-*mix* itu semua.” Kriteria subjektif ini penulis adopsi dari perumpamaan (boleh dilihat juga sebagai rumusan) yang dikemukakan Prof. Dr. Satrio Soemantri Brojonegoro (dalam Putra, 2015), Mantan Dirjen Dikti, yakni: “Kampus tidak boleh kaku dan kampus tidak boleh diatur. Kalaupun ada aturan, aturan dan SOP kampus tidak boleh seragam. Jadi, ibarat buah-buahan, ada durian, nenas, dan apel. Tidak mungkin kita membandingkan buah-buahan tersebut karena memang satu sama lain berbeda. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menghasilkan durian, nenas, atau apel yang paling baik.” Implikasi awal sederhana dari pernyataan ini adalah pertanyaan: Apakah dosen mungkin untuk menjadi “maestro” dalam semua dimensi dari kewajiban tridarmanya? Sebagai misal: Ada dosen yang sangat mencintai darma pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan eklektik (meramu berbagai teori yang sesuai untuk menyusun modul dan menggunakan modul itu untuk mengintervensi masyarakat); ada dosen yang sangat *passionate* dalam darma penelitian. Bagaimana agar analogi “buah-buahan” itu berlaku? Perlukah sistem seleksi Dosen Berprestasi bersifat apresiatif dan mengakomodasikan diferensiasi semacam itu? Perlu adanya pemikiran kembali sehingga sistem tidak bersifat monotonik seolah-olah Dosen Berprestasi pasti unggul sekaligus dan merupakan “superman” dalam ketiga darmanya.

2. Kebebasan Akademik dan Dimensi-dimensinya

Ungkapan Brojonegoro tersebut tepat menyentuh jantung psikologi, yakni penghargaan atau apresiasi terhadap perbedaan individual (*individual differences*). Dosen yang adalah manusia tidak dilihat sebagai statistik, melainkan sebagai manusia. Sementara itu, sebuah hal fundamental yang menyusun manusia dan membuat manusia berbeda satu sama lain adalah pemaknaan, penghayatan, pembedaan, dan perwujudan dari kebebasannya. Satu kata kunci yang tidak muncul secara eksplisit dalam risalah Seniati (2009) adalah *kebebasan*, khususnya kebebasan akademik (*academic freedom*). Senapas dengan ungkapan Brojonegoro, menurut hemat penulis, seluruh pendekatan berbasis psikologis yang dikemukakan oleh Seniati (2009) sangat berharga, namun hendaknya berkonvergensi pada (ataupun dibalut oleh) garansi atau penjaminan kebebasan akademik. Baru-baru ini, Teresa A. Sullivan, Rektor Universitas Virginia (dalam Baty, 2017) menandakan hal yang seharusnya menjadi “hukum besi” universitas manapun, yakni “*To be truly world class, a university must practise an unrestrictive style of governance. The university’s governance structures must relax controls sufficiently to allow faculty creativity to flourish.... A world-class university should be a meritocracy in every respect – in organisation and leadership, and in teaching, research and service. Academic freedom is an essential quality for a world-*

class university.” Tidak ada Universitas Berkelas Dunia tanpa kebebasan akademik di dalamnya.

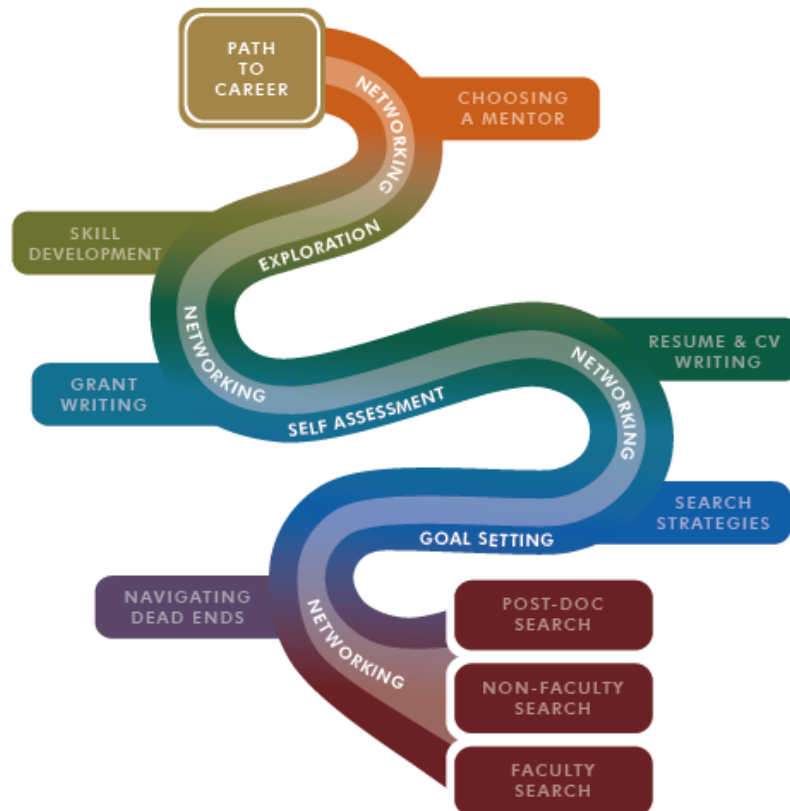
Oleh karenanya penting untuk mengenali dimensi-dimensi dari kebebasan akademik. Dimensi-dimensi itu adalah (Karran & Mallinson, 2018): (1) Kebebasan untuk menentukan (*freedom to determine*), misalnya menentukan pedagogi pengajaran, menentukan topik penelitian, menentukan tempat diseminasi hasil penelitian, dan sebagainya; (2) Pengelolaan diri (*self-governance*), misalnya kebebasan untuk menyuarakan opini terkait dengan sebuah lembaga, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan universitas, bebas menggabungkan maupun melepaskan diri dari posisi-posisi dalam universitas; (3) *Tenure*, yaitu berhak untuk memperoleh keamanan pekerjaan dalam universitas berdasarkan prosedur penelaahan riwayat dan reputasi akademik secara wajar; dan (4) Privilise, misalnya bebas untuk mempertanyakan dan menguji kebijakan yang dilimpahkan kepadanya, bebas mengemukakan gagasan baru/kontroversial/tidak populis tanpa harus terjebak dalam risiko kehilangan pekerjaan. Hal yang menarik dalam kajian Karran dan Mallinson ialah bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari perjuangan ilmiah (*scientific endeavor*). Hal inilah yang merupakan jembatan penjelasan terpenting mengenai mengapa kebebasan akademik menjadi prasyarat sebuah Universitas Berkelas Dunia.

Universitas Berkelas Dunia dalam arti sebenar-benarnya, menurut hemat penulis, merupakan universitas yang melakukan perjuangan ilmiah yang hebat. Guna memberikan deskripsi operasional mengenai perjuangan ilmiah yang buruk, dapat diambil contoh ungkapan Crandall (2018): *“Editors are gatekeepers, but they must situate the gate at a place where entry can earned by all. We suggest that the current Editor has failed at this, and substantially and repeatedly so.... We consider this behavior an abuse of power, which should be condemned by the field and by APS”* yang mengkritik praktik dari Robert Sternberg, seorang psikolog dan editor jurnal *Perspectives on Psychological Science*, 13(2), Maret 2018, yang menyalahgunakan posisinya dalam proses rekrutmen penulis dan sitasi. Kita dapat membayangkan bahwa perjuangan ilmiah, baik pada tingkat individual maupun sosial-struktural sangat perlu diusahakan waktu demi waktu.

3. Komitmen terhadap Kebebasan Akademik Berimplikasi terhadap Perguruan Tinggi dan Sistem Pembinaan Karier Dosen

Bagaimana implikasi dari kebebasan akademik? Proses seleksi, perawatan, pembinaan, pemberdayaan, dan promosi dosen maupun pemimpin, pengelola dan pelayan dalam perguruan tinggi hendaknya menjadikan kebebasan akademik sebagai parameter utamanya. Ironisnya, berbagai kepentingan politis dan ekonomis yang mempengaruhi

kampus (eksternal) maupun yang beroperasi di dalam kampus itu sendiri (internal) seringkali membuat kebebasan akademis terlanggarkan dan terusakkan; padahal, kebebasan akademik lah yang merupakan faktor determinan bertahannya ilmuwan-ilmuwan terbaik dalam sebuah kampus (Tierney & Postiglione, 2015). Itu dari sisi organisasi.



Gambar 1. Unsur-unsur Pembinaan Karier

Gambar 1 diambil dari School of Medicine, Vanderbilt University (Sumber: <https://medschool.vanderbilt.edu/career-development/blog/path-career-compendium-interview-questions>). Gambar ini memperlihatkan elemen-elemen yang penting diintegrasikan dalam sistem pembinaan karier dosen oleh sebuah universitas. Dimulai dari perencanaan jalur karier, proses berjejaring (termasuk penentuan mentor; dalam program Kemristekdikti terdapat “pencangkakan dosen”), penggalian diri (termasuk pengembangan keterampilan, kemampuan menulis resume dan proposal hibah), asesmen/pemeriksaan diri, penentuan tujuan (*goal setting*), strategi pencarian, dan

menghadapi jalan buntu (*navigating dead ends*). Unsur-unsur ini apabila dijalani dengan baik dalam periode waktu yang wajar akan membuat seorang dosen semakin bebas secara akademik dan percaya diri dalam melalui jenjang kariernya mulai dari Asisten Ahli hingga Guru Besar karena pertambahan kemampuan yang relatif permanen di setiap langkah akan signifikan berkontribusi terhadap *academic grading* seorang dosen. Dalam kaitan dengan penggalan diri di atas, berdasarkan survey yang dilakukan oleh IDRI pada 8-9 April 2018 yang melibatkan 208 responden, diketahui bahwa dosen sangat membutuhkan (1) Program induksi mengenai dunia kedosenan secara umum, pedagogi (cara mengajar, manajemen kelas), (2) Pengembangan kemampuan menulis ilmiah (di dalamnya termasuk menulis dalam bahasa Inggris dan publikasi ilmiah internasional bereputasi). Yang menarik bahwa, di era digital ini, dosen secara khusus mengharapkan agar program-program tersebut diselenggarakan secara daring (*online*) dan gratis; misalnya dengan memvideokan pelatihan/pendidikan/sosialisasi dari Kemristekdikti di berbagai tempat di Indonesia yang dapat diakses oleh dosen dan publik melalui repositori daring.

Dari sisi dosen: Dosen yang tidak mau menerima fakta bahwa dirinya memiliki kebebasan akademik, tidak bersedia menyadari eksistensi kebebasan akademiknya, malahan tidak mau melaksanakan kebebasan itu, patut dipertanyakan sejak dini motivasinya untuk menjadi dosen. Memang agak mengherankan dan terdengar “kontra-intuitif” bahwa ada kemungkinan (calon) dosen menolak fakta kebebasan akademisnya. Seorang psikoanalisis sosial, Erich Fromm, sudah meramalkannya dan pernah menulis buku berjudul *Escape from Freedom* (1941), atau “Lari dari Kebebasan”. Kebebasan memang berisiko tinggi; banyak manusia (jadi: termasuk dosen) yang tidak sanggup menanggung kebebasan dan hal ihwal yang termasuk di dalamnya, sehingga menyerahkan diri pada otoritarianisme. Dalam kaitan dengan ini, Dubrovskiy (2017) mengutip sebuah ungkapan dari Richard Shaul, yang penting ditulis ulang di sini: “*There is no such thing as a neutral educational process. Education either functions as an instrument which is used to facilitate the integration of the younger generation into the logic of the present system and bring about conformity to it, or it becomes ‘the practice of freedom’, the means by which men and women deal critically and creatively with reality and discover how to participate in the transformation of their world.*” (Dubrovskiy, 2017, h. 172). Kebebasan dapat mengubah dunia, namun sekali tidak dilaksanakan, maka orang pasti jatuh pada sisi ekstrim lain, yakni konformitas. Tidak ada wilayah netral, atau pun tempat untuk meletakkan “dua kaki”. Memang lebih mudah menjatuhkan diri dalam konformitas buta terhadap sistem pendidikan, namun apakah itu yang kita kehendaki untuk menjadi sebuah Universitas Berkelas Dunia?

4. Kebebasan, Kebertanggungjawaban, dan Kewargaan Akademik

Guna memperdalam pengertian tentang kebebasan akademik, penulis mengadopsi pengertian “sehat mental”, yakni bukan hanya ketiadaan penyakit fisik maupun jiwa, melainkan juga mampu menyadari potensi dirinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, mampu bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi terhadap masyarakatnya (World Health Organization, 2014). Diaplikasikan pada kebebasan akademik, hal ini bermakna bahwa “bebas secara akademik” bukan hanya sekadar tidak terganggunya kebebasan itu (oleh intimidasi, teror, korupsi, kepentingan politik, dan sebagainya), melainkan juga dosen mampu mengoptimalkan perwujudan talenta dirinya, mampu menjawab tantangan terhadap kebebasannya, serta membuahkan karya dari kebebasannya itu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk komunitasnya.

Kebertanggungjawaban terhadap diri sendiri dan masyarakat sebagai konsekuensi dari kebebasan akademiknya sejalan dengan premis dasar bahwa kebebasan merupakan entitas yang sangat berharga yang membuat manusia berharkat dan bermartabat. Sabdono (2016, bab 8), menyatakan: “Jika pemberian yang berharga tanpa tanggungjawab, maka hal itu membuat pemberian itu sendiri menjadi tidak berharga.” Oleh karena itu, pelaksanaan kebebasan akademik seyogianya pasti “berkarakter”, dalam arti memberikan perhatian pada pokok pikiran psikologi kritis (*critical psychology*), yakni bahwa penting bagi proses pendidikan untuk “*to advocate and voice the opinion of the unheard minority and liberate the marginalized*” (Abraham & Prayoga, 2017, h. 123).

Bahkan sebelum sampai ke sana, kebertanggungjawaban terhadap masyarakat sebagai konsekuensi inheren-logis dari kebebasan akademik dapat diwujudkan dalam “kewargaan akademik” (*academic citizenship*) (Dean & Forray, 2017). Sebagai warga akademik yang baik, ilmuwan perlu menyadari bahwa posisinya bukan hanya untuk dirinya, melainkan juga membantu sesama (calon) ilmuwan melalui tinjauan rekan setara (*peer review*) dalam berbagai bentuk (tulisan penilaian, pendampingan, dan sebagainya), meskipun sebenarnya bukan merupakan bagian dari *key performance indicator* primernya. Kendati demikian, hal ini juga perlu didukung secara struktural oleh sebuah sistem yang mencatat tindakan kewargaan tersebut sebagai sebuah kontribusi intelektual sebagaimana seseorang menulis sebuah artikel yang memiliki *original contribution*.

Sebagai anggota ADEI (Asosiasi Dewan Editor Indonesia), penulis merekomendasikan agar saran-saran dari Dean dan Forray (2017) dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh ADEI maupun diintegrasikan dalam Sistem Pembinaan Karier Dosen Kemristekdikti. Betapa pentingnya saran mereka karena menegakkan pelaksanaan kebebasan akademik serta menjamin keberlangsungan ekosistem ilmiah yang bermutu, sehingga penulis memaparkan ulang beberapa dari satu lusin gagasan Dean dan Forray (2017, h. 3-5), yakni:

(1) *Offer letters from the Editors-in-Chief (EICs) that acknowledge a reviewer's work and, if relevant, what the reviewer rating is*; (2) *Advocate for systemic change in the way reviewing is rewarded and valued*; (3) *List details of reviewing under "Intellectual Contributions" on one's CV*; (4) *Include reviewing within scholarly activity in annual performance reports and on websites and other public displays of scholarly activity*; dan (5) *Change cultural expectations to one of "pay back" for reviewer energy*. Dalam era digital dewasa ini, kita juga perlu memikirkan kembali bagaimana kita akan menilai kontribusi intelektual seorang *mitra bestari*, dan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai "mitra"? Apakah memberikan kritik dan saran pengembangan artikel melalui *academic social media* atau kolom komentar yang tersedia dapat direkognisi sebagai aktivitas kontributif intelektual dan karenanya berkualifikasi sebagai mitra bestari? Bagaimana menyusun "metrik baru" yang apresiatif terhadap perilaku kewargaan akademik, dan mengintegrasikannya dalam sistem Beban Kerja Dosen (BKD), misalnya?

Kita perlu menyadari bahwa bukan hanya *semakin bebas, semakin bertanggungjawab* kita, melainkan juga *semakin bertanggungjawab, semakin bebas* kita (Magnis-Suseno, 1987). Misalnya, Kementerian Ristekdikti perlu memfasilitasi kebebasan akademik dosen dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk menempuh studi lanjut maupun melakukan penelitian dalam berbagai skemanya, tetapi tanpa dosen harus *terlalu tegang* di antara perubahan-perubahan regulasi terkait kriteria/kualifikasi penerima (*awardee*)-nya maupun dalam penantian pencairan dananya. Apabila kebebasan ini dilaksanakan dengan tanggungjawab, maka baik dosen maupun Kemristekdikti semakin memperoleh "kebebasan-kebebasan baru" berkat inovasi ilmu dan teknologi yang dihasilkan baik oleh individu maupun kelompok dosen yang menjalani studi lanjut maupun penelitian. Kebebasan-kebebasan baru inilah yang akan semakin mengantarkan pada terbukanya jalan menuju Universitas Berkelas Dunia. Logika ini cukup linear namun banyak juga yang tidak menyadarinya, sehingga "Menganugerahkan kebebasan" dipandang sebagai "beban anggaran" dan "Menjawab kebebasan" dipandang sebagai "beban administrasi". Penyamaan persepsi dalam konteks ini sangatlah perlu.

5. Terminologi "Membangun Mahasiswa" Tidak Sejalan dengan Kebebasan Akademik

Bagaimana halnya dengan relasi antara perguruan tinggi dan mahasiswa? Dengan mengasumsikan bahwa mahasiswa juga memiliki kebebasan akademik, maka menjadi tidak tepat lagi istilah "membangun mahasiswa" yang kerap terdengar selama ini. Magnis-Suseno (1995, h. 190-191, 196) menjelaskan: "Dalam arti yang sebenar-benarnya, manusia

tidak dapat dan tidak boleh dicoba dibangun. Mengapa tidak? Karena manusia itu bukan batu, bukan benda mati, melainkan makhluk hidup, bahkan makhluk yang berkepribadian, bercita-cita, *berkebebasan*, bertanggungjawab, bersuara hati. Bukankah bahasa pembangunan adalah bahasa bagi hubungan antara manusia dan benda, dan bukan bagi hubungan antar manusia? ... Mau membangun manusia berarti secara implisit, barangkali tanpa disadari, bahwa manusia dibicarakan, lalu juga diperlakukan, sebagai benda mati. Sikap tepat manusia terhadap manusia adalah *komunikasi*.... (K)ita semua saling mendukung dalam mengembangkan diri dan lingkungan kita, di mana semua terlibat sesuai dengan kecakapan, kedudukan dan tugas masing-masing, dalam sikap hormat terhadap martabat kita semua sebagai manusia.” Kita tidak boleh mewajibkan mahasiswa mengerjakan skripsi dengan menggunakan hanya metodologi kuantitatif, misalnya, dengan mengatasnamakan “membangun mahasiswa yang bernalar lebih lurus”.

6. Krisis Kebebasan Akademik di Era Digital?

Sebagai rekomendasi kebijakan, penulis sesungguhnya telah menyampaikan beberapa butir ajuan praktis sepanjang tulisan di atas, mulai dari penggunaan bahasa (“Membangun?”) sampai dengan saran praktik proses rekrutmen dan penciptaan iklim umum perguruan tinggi. Sebagai masukan akhir, penulis mengajak kita semua guna, tidak hanya menjaga kebebasan akademik dari keterancaman, melainkan juga menumbuhkan-suburkan perwujudan dari kebebasan itu. Salkin (2014), empat tahun yang lalu, telah mengingatkan kita mengenai berbagai kasus yang mengganggu kebebasan akademik di berbagai belahan dunia, seperti kebijakan kontrol dan “*sweeping*” media sosial dosen dan mahasiswa di University of Kansas yang dituduh bertentangan dengan “kepentingan terbaik” kampus, serta pemecatan seorang dosen di University of Colorado at Boulder karena memberikan kuliah mengenai prostitusi dengan metode teatrikal yang unik. Mahfud MD (1997) menyatakan bahwa kebebasan akademik, yang mencerminkan kebebasan perguruan tinggi untuk berfungsi dan melaksanakan darma perguruan tinggi tanpa intervensi kekuasaan luar, dapat pula terancam oleh pengkultusan tenaga akademik tertentu oleh pemujanya atau pemuja ajarannya. Bahkan verbalisasi spontan seorang tokoh kampus yang tidak relevan dengan keahliannya dianggap sebagai pendapat yang otoritatif. Hal ini menurut Mahfud MD merupakan kebebasan akademik yang “kebablasan”.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut pemahaman sebagian orang, Indonesia pernah mengalami krisis kebebasan akademik ketika kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus diterapkan oleh Mendikbud saat itu Daoed Joesoef (Galih, 2016). Di era digital dan perlombaan universitas menjadi Universitas Berkelas Dunia seperti sekarang ini, apakah

krisis kebebasan akademik masih mungkin terjadi? Sebuah isu yang relevan yang menjadi diskusi yang cukup hangat dalam sebuah *social media group* dari para dosen akhir-akhir ini adalah mengenai kebijakan jumlah penulis dalam sebuah artikel jurnal atau prosiding ilmiah. Sudah sejak 1982, White, Dalglish, dan Arnold melaporkan bahwa: “*Longitudinal data derived from the American Journal of Psychology, the British Journal of Psychology, and Psychological Abstracts were examined and revealed that over the last 50 years, there has been a significant decrease in the frequency of single-author papers*” (White, Dalglish, & Arnold, h. 190). Lebih lanjut, Greene (2018) melaporkan bahwa: “*During the editorship of Philip Campbell (1995 onwards), the single author has all but disappeared*”. Kecenderungan-kecenderungan tersebut kemudian dijadikan bahan bangun sejumlah kebijakan yang berkeberatan terhadap artikel dengan penulis tunggal (lihat: Noor, 2013).

Ada juga jurnal-jurnal ilmiah di Indonesia yang menolak artikel karena artikel tersebut pada saat *submission* diketahui oleh Editor sudah berada di *preprint server* (seperti <http://osf.io> dan <http://inarxiv.id>) dan menganggapnya sebagai tindakan plagiarisme diri. Perlu kita ingat juga hal yang diungkap oleh McKiernan (n.d.): “*You don’t have to sacrifice quality or academic freedom to publish openly.*” Apakah transparansi penulis untuk membuka kepada publik naskahnya sejak awal proses publikasi memang relevan untuk dikritik dan, karenanya, berpotensi mengorbankan kebebasan akademik? Padahal, dalam wajah yang lain, tindakan akuntabel semacam itu sudah disarankan sejak pangkalnya, yakni *pre-registrasi*. Pre-registrasi adalah tindakan untuk meregistrasikan secara daring (online; misalnya melalui <http://osf.io>) –dan karenanya juga berarti: mengumumkan– hipotesis, desain, dan langkah-langkah beserta rincian spesifik penelitian sebelum pengumpulan data empiris dilakukan (Association for Psychological Science, 2016). Pre-registrasi dan mengumumkan naskah sebelum mitra bestari melakukan penelaahan ialah berada dalam satu payung paradigma, yakni Sains Terbuka (*Open Science*). Keduanya juga merupakan produk sekaligus aktivitas dari kebebasan akademik. Kita tidak mungkin menerima yang satu tetapi menolak yang lain.

7. Rasionalitas dan Manajemen Pengetahuan Mendukung Kebebasan Akademik

Yang menjadi fokus pembahasan kali ini bukanlah apakah *single-authorship* (juga *hyper-authorship*, dan jenis-jenis *authorship* lainnya) serta tindakan mengarsipkan secara terbuka manuskrip sebelum melalui *peer review* harus diterima ataukah dilarang, melainkan perlunya untuk menjaga kebijakan –mengenai apapun itu– agar selalu diiringi oleh rasionalitas yang kuat. Rasionalitas tersebut hendaknya dimaterialisasikan dalam arti

dinyatakan secara eksplisit (misalnya, dicantumkan dalam *Panduan Bagi Penulis* dalam sebuah jurnal ilmiah), bukan tinggal sebagai kebijaksanaan implisit sehingga tampil sebagai ambiguitas di tengah-tengah masyarakat akademik. Dalam hal inilah fungsi manajemen pengetahuan/*knowledge management* bekerja. Hal ini menjadi penting khususnya dalam orientasi nilai kultur nasional Indonesia di mana jarak kekuasaan (*power distance*) masih tinggi (Hofstede Insights, n.d.) dan berpotensi mereduksi arti penting *komunikasi* (lihat pendapat Magnis-Suseno, 1995, di atas). Sementara itu, terdapat bukti-bukti empiris bahwa tingginya jarak kekuasaan berkorelasi terbalik dengan praktik manajemen pengetahuan (Bamgboje-Ayodele & Ellis, 2015; Chmielewska-Muciek & Sitko-Lutek, 2013). Artinya dalam suasana yang demikian, proses ko-kreasi kebijakan antara pimpinan dan yang dipimpin rentan untuk tidak tegar/gigih.

Dalam kaitan dengan praktik manajemen pengetahuan, dibangunnya SISTer (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, <http://sister.ristekdikti.go.id>) patut dipuji karena sistem ini akan mengintegrasikan “sejumlah layanan seperti perubahan data dosen, penilaian angka kredit (PAK), sertifikasi dosen, Beban Kerja Dosen (BKD), dan beasiswa” serta di dalamnya “dosen diberi kuasa dan tanggung jawab atas datanya sendiri” (Ali Ghufon Mukti, sebagaimana dikutip dalam Napitupulu, 2018). Pengembangan lebih lanjut akan terkait dengan kekenyalan sistem ini. Sebagai contoh, apakah sistem ini terbuka untuk dapat dihubungkan dengan (baca: dapat menarik data dari) sistem internal yang sudah dimiliki oleh sejumlah perguruan tinggi, semudah *plug-and-play*? Sebaliknya, apakah keluaran dari SISTer dapat dihubungkan lagi dengan sistem lain yang di masa depan akan dibangun oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai kebutuhannya? Apakah prinsip *replication* and *reuse* dapat diterapkan dengan mudah? Itu dari sisi *hard*-nya. Dari sisi *soft*, apakah sistem penilaian, konversi, dan pembobotan akan terintegrasi secara otomatis, misalnya antara SINTA (*Science and Technology Index*, <http://sinta2.ristekdikti.go.id>), BKD dan PAK? Hubungannya dengan kebebasan akademik, meskipun tidak bersifat langsung, ialah bahwa, ternyata, seringkali pelaksanaan kebebasan akademik menyita banyak waktu dosen karena merupakan sebuah lingkaran aksi dan refleksi terus-menerus. Dengan sistem kependidikan yang efisien dan terintegrasi, diharapkan pelaksanaan kebebasan akademik tidak dirugikan, minimal dari sisi waktu, dengan kesibukan yang lebih kental nuansa administratifnya. Dalam kaitan dengan relaksasi upaya administratif ini, berdasarkan survey yang dilakukan oleh IDRI pada 8-9 April 2018 yang melibatkan 208 responden, diketahui bahwa dosen sangat membutuhkan (1) simulasi PAK online untuk setiap jenjang jabatan akademik, sehingga secara *real time*, dosen mengetahui (2) status dan kekurangan angka kredit, (3) dan cara untuk melengkapi kekurangan tersebut; dan oleh karenanya secara teknis, dosen menghendaki dibangunnya (3) sistem pengingat (*alert system*) untuk memenuhi target jabatan akademik dalam kurun waktu sewajarnya.

8. Simpulan

Kita ingin menjadi Universitas Berkelas Dunia. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kebebasan akademik kita dengan cara ikut dalam perjuangan ilmiah. Kita perlu mewaspadai argumen maupun praktik yang kurang suportif, atau malah kontra-produktif, terhadap kebebasan akademik menuju Universitas Berkelas Dunia. Sebaliknya, kita perlu melipatgandakan habitus (tendensi, disposisi berpikir-merasa-berselera-berucap-bertindak-dan berposisi) yang berkelas dunia dengan memanfaatkan psikologi secara inovatif sebagaimana dipaparkan sepanjang tulisan ini.

9. Pengakuan (*Acknowledgment*)

Pada 19 Maret 2018, Ikatan Dosen Republik Indonesia (IDRI) menyampaikan aspirasi dosen kepada Panja Evaluasi Ristek Dikti di Komisi X DPR RI. Salah satu tindak lanjutnya adalah IDRI diharapkan dapat memberikan Kajian Pendidikan Tinggi. Artikel ini merupakan bagian dari Kajian Pendidikan Tinggi khususnya pada butir *Sistem Pembinaan Karier Dosen*.

10. Penulis

Penulis: Dr. Juneman Abraham adalah Psikolog Sosial

Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara

BINUS Kampus Kijang, Jl. Kemanggisan Ilir III no. 45, Palmerah, DKI Jakarta 11480.

Email: juneman@binus.ac.id

References

Abraham, J. (2017, 10 Januari). Kriteria objektif dan iklim universitas berkelas dunia. Retrieved from <https://psychology.binus.ac.id/2017/01/10/kriteria-objektif-dan-iklim-universitas-berkelas-dunia/>

Abraham, J., & Prayoga, T. (2017). Indonesian students' representation on psychology and social change: Challenge for curriculum progression. *Open Journal of Social Sciences*, 5(8), 122-135.

Association for Psychological Science. (2016, 18 Agustus). What is preregistration, anyway? Retrieved from

<https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/obsonline/what-is-preregistration-anyway.html>

Baty, P. (2017, 13 November). Virginia president puts academic freedom at heart of China speech. Retrieved from <https://www.timeshighereducation.com/news/virginia-president-puts-academic-freedom-heart-china-speech>

Bamgboje-Ayodele, A., & Ellis, L. (2015). Knowledge Management and the Nigerian Culture—A round peg in a square hole?. *The African Journal of Information Systems*, 7(1), 1.

Chmielewska-Muciek, D., & Sitko-Lutek, A. (2013). Organizational culture conditions of knowledge management. *Proceedings of Management, Knowledge and Learning International Conference*, 19-21 June 2013, Zadar, Croatia (pp. 1363-1370). Retrieved from <http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-463.pdf>

Crandall, C. (2018, 2 April). Letter to APS on PoPS.
<http://doi.org/10.17605/OSF.IO/W2EXA>

Dean, K. L., & Forray, J. M. (2017). The long goodbye: Can academic citizenship sustain academic scholarship?. *Journal of Management Inquiry*, 00(0), 1-5.

Dubrovskiy, D. (2017). Escape from freedom: The Russian academic community and the problem of academic rights and freedoms. *Interdisciplinary Political Studies*, 3(1), 171-199.

Fromm, E. (1941). *Escape from freedom*. US: Farrar & Rinehart.

Galih, B. (2016, 8 Agustus). Daoed Joesoef, kontroversi NKK/BKK, dan beda pendapatnya dengan Soeharto. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontroversi.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto>.

Greene, M. (2018). The demise of the lone author. Retrieved from <https://www.nature.com/nature/history/full/nature06243.html>

Hofstede Insights. (n.d.). Country comparison: What about Indonesia? Retrieved from <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/indonesia/>

Karran, T., & Mallinson, L. (2018). Academic freedom and world-class universities: A virtuous circle?. *Higher Education Policy*, 1-21.

Magnis-Suseno, F. (1987). *Etika dasar: Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.

Magnis-Suseno, F. (1995). *Filsafat-kebudayaan-politik: Butir-butir pemikiran kritis*. Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama.

Mahfud MD, M. (1997). Perspektif politik dan hukum tentang kebebasan akademik dan kritik sosial. *UNISIA*, 32/XVII/IV, 33-43. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/89331-ID-perspektif-politik-dan-hukum-tentang-keb.pdf>

McKiernan, E. C. (n.d.). Publish where you want. Retrieved from <http://whyopenresearch.org/archiving>

Napitupulu, E. L. (2018, 21 Maret). Pendataan dosen secara daring dibangun. Retrieved from <https://kompas.id/baca/humaniora/dikbud/2018/03/21/pendataan-dosen-secara-daring-dibangun/>

Noor, M. M. (2013). What is your opinion on single author papers. Retrieved from https://www.researchgate.net/post/What_is_your_opinion_on_single_author_papers

Putra, M. (2015, 24 September). Dosen wajib absensi? Bukan dosen namanya tapi karyawan perusahaan. Retrieved from <http://riauposting.com/berita/pendidikan/3616/dosen-wajib-absensi-bukan-dosen-namanya-tapi-karyawan-perusahaan/>

Sabdono, E. (2016). *Kehendak bebas manusia*. Jakarta, Indonesia: Rejobot Literature.

Salkin, G. (2014, 14 February). 5 issues that threaten academic freedom. Retrieved from <https://www.educationdive.com/news/5-issues-that-threaten-academic-freedom/227738/>

Seniati, A. N. L. (2009, 28 Oktober). Peran psikologi dalam mengembangkan universitas kelas dunia. Retrieved from <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/liche/publication/pidatopengukuhangb-liche-28okt2009.pdf>

Tierney, W., & Postiglione, G. A. (2015, 5 Juli). The vital role of academic freedom in creating a world-class university. Retrieved from <http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/1832071/vital-role-academic-freedom-creating-world-class-university>

White, K. D., Dalgleish, L., & Arnold, G. (1982). Authorship patterns in psychology: National and international trends. *Bulletin of the Psychonomic Society*, 20(4), 190-192.

World Health Organization. (2014). Mental health: A state of well-being. Retrieved from http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/